
UPAYA KPU KOTA SERANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK 2024

Yohanes Oci^{1*}, Yulvia Chrisdiana², Louise Nisa Rindarto³, Tetti Flora Barutu⁴
^{1,2,3,4} Universitas Pamulang

Email: dosen10123@unpam.ac.id¹, dosen03228@unpam.ac.id²,
louisenisarindarto@gmail.com³, tettiflorab@gmail.com⁴

*Korespondensi: dosen10123@gmail.com

(Submission 20-08-2025, Revisions 31-10-2025, Accepted 31-10-2025)

Abstract

This study aims to explain the efforts of the General Election Commission (KPU) of Serang City in increasing public political participation in the 2024 Simultaneous Regional Elections. General Elections are part of public political participation to take part in a country's politics. Public political participation is an important indicator in a healthy democracy. The 2024 Simultaneous Regional Head Elections, as part of the democratic process in Indonesia, offer the public an opportunity to play an active role in determining leaders at the regional level. In this context, the role of the Serang City KPU as the election organizer is a major factor in optimizing citizen involvement in political participation in the Simultaneous Pilkada. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The results show that the KPU of Serang City has implemented various strategies to increase participation, such as community-based socialization, political education for first-time voters, anti-golput campaigns, and collaboration with community leaders and academics. Obstacles faced include low public political awareness, lack of public trust in political institutions, and economic factors. This research emphasizes the importance of adaptive and participatory election management strategies to maintain the quality of local democracy.

Keywords: *General Elections Commission (KPU), Political Participation, Simultaneous Regional Elections, Serang City*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak tahun 2024. Pemilihan Umum merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat untuk ambil bagian dalam politik suatu negara. Partisipasi politik masyarakat adalah indikator penting dalam demokrasi yang sehat. Pilkada Serentak 2024 sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah. Dalam konteks ini, peran KPUD Kota Serang sebagai penyelenggara pemilu menjadi faktor utama untuk meningkatkan keterlibatan warga negara

sebagai bentuk partisipasi politik di Pilkada Serentak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPUD Kota Serang telah melaksanakan berbagai strategi peningkatan partisipasi, seperti sosialisasi berbasis komunitas, pendidikan politik pemilih pemula, kampanye anti-golput, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan akademisi. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran politik masyarakat, kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik, dan faktor ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi penyelenggara pemilu yang adaptif dan partisipatif guna menjaga kualitas demokrasi lokal.

Kata Kunci: KPU, Partisipasi Politik, Pilkada Serentak, Kota Serang

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Joseph Schumpeter, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, tetapi juga sebagai suatu prosedur institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi antar pemimpin yang ingin memperoleh dukungan rakyat (Efriza dan Jerry Indrawan, 2019). Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi prosedural yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin melalui mekanisme yang bebas, langsung, dan adil.

Pemilu dalam pelaksanaan demokrasi erat kaitannya dengan asas keterbukaan dalam memilih pemimpin. Melalui pemilu, pemimpin dituntut tidak saja memiliki elektabilitas, tetapi juga kapabilitas sehingga publik bisa menentukan pilihan berdasarkan kedua hal itu. Oleh karena itu, proses pemilu membutuhkan penyelenggara pemilu yang memiliki peran fundamental dalam memastikan mekanisme demokrasi berjalan secara transparan dan kredibel.

Dalam konteks Pilkada Serentak 2024 di Kota Serang, Banten, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Serang sebagai penyelenggara pemilu memegang tanggung jawab besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai indikator keberhasilan demokrasi lokal. Selain peran partai politik sebagai peserta pemilu, lembaga pelaksana penyelenggaraan pemilu seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas serta DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), keberadaannya sangat penting karena berkaitan dengan regulasi dan pemilu yang melahirkan asas Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).

Sebagai negara yang mentasbihkan diri menganut sistem politik demokrasi, maka pemilu itu merupakan pesta rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menempatkan pemilu sebagai agenda kenegaraan penting sehingga harus dijaga. Pengertian dijaga dalam konteks ini adalah dijaga dari segala bentuk sikap dan tindakan yang memungkinkan proses pemilu dibelokkan menjadi ajang “transaksi” politik murahan dengan sekadar membeli suara menggunakan uang receh. Pemilu mesti dikawal agar ia tetap pada kediriannya sebagai momen pembaharuan kontrak politik antara antara rakyat dengan wakilnya (Saldi Isra, 2017:177).

Ciri sebuah demokrasi adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilu. Karenanya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian yang terpenting dalam negara yang menganut sistem demokrasi (Daud M.

Liando, 2016: 15). Namun dalam perjalanannya, pemilu seringkali mengalami problematika yang kian kompleks, seperti adanya konflik horizontal dan vertikal yang melibatkan kalangan akar rumput dan perpecahan di kalangan elit politik sehingga berdampak buruk pada konstituen. Situasi ini bisa mengakibatkan polarisasi yang semakin tajam dan terjadinya konflik yang tidak terhindarkan. Akibat dari itu semua pada ujungnya bisa memengaruhi pelaksanaan pemilu yang damai, adil, dan jujur.

Tjenreng (2020: 67) mengungkapkan adanya beberapa permasalahan yang membuat demokrasi tidak berjalan secara efektif, terutama pada proses rekrutmen kader partai politik. *Pertama*, sistem pemilu proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen. *Kedua*, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. *Ketiga*, dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi (*linkage*) yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. *Keempat*, dalam proses rekrutmen partai politik sering menerapkan pendekatan “*asal comot*” terhadap kandidat yang dipandang sebagai “mesin politik”, dan yang *kelima*, bahwa proses kampanye (sebagai bagian dari mekanisme rekrutmen) tidak diisi dengan pengembangan ruang publik yang demokratis, dialog yang terbuka dan sebagai arena untuk kontrak sosial untuk membangun visi bersama, melainkan hanya sebagai ajang *show of force* dan obral janji

Pelaksanaan pemilu yang baik artinya tidak melanggar prinsip hukum dan kode etik. Seluruh penyelenggara didorong agar patuh pada prinsip dan asas pemilu sehingga *output*-nya akan baik pula. Indikator keberhasilan pemilu, salah satunya adalah peran lembaga penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat agar memberikan hak suaranya dalam menentukan pemimpin yang akan dipilihnya. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat diharapkan untuk pro aktif untuk menilai dan menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan arahan dari pihak manapun.

Persoalannya, tingkat partisipasi politik masyarakat di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Banten, dalam pemilu tergolong rendah. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Serang. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024, KPUD Kota Serang bekerja keras mendorong partisipasi aktif masyarakat agar kualitas demokrasi tetap terjaga dengan baik. Usaha ini juga dilakukan oleh partai politik, yang salah satunya terlihat dari bermunculannya atribut partai di pinggir jalan serta iklan di berbagai media dalam rangka mendorong keterlibatan masyarakat dalam pilkada Kota Serang.

Berdasarkan data pemilih sementara KPUD Kota Serang tahun 2024, jumlah pemilih pada Pilkada Kota Serang tahun 2024 sebanyak 513.744 pemilih dengan komposisi pemilih laki-laki sebanyak 258.838 dan pemilih dari kalangan perempuan sebanyak 254.906. Jika dibandingkan dengan data Pemilu 2024 yang jumlah pemilihnya berada pada angka 508.278 pemilih, maka jumlah pemilih pada Pilkada Serentak 2024 meningkat 1,01%. Adapun Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersedia di Kota Serang adalah sebanyak 992, yang terdiri dari TPS reguler 990 dan dua TPS khusus. TPS khusus tersebut ditempatkan di Lapas dan Rutan.

Dengan adanya kenaikan jumlah pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Serang, maka hal ini bisa dinilai sebagai adanya efektivitas strategi sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Serang. Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya kolaborasi antara penyelenggara pemilu seperti KPUD Kota Serang dengan partai politik melalui upaya pemasangan atribut partai politik di ruang-ruang publik, cukup efektif. Selain itu, upaya KPUD Kota Serang yang secara masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menysasar berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan agar dengan aktif memberikan suaranya kepada calon pemimpinnya, memiliki efek yang mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Meskipun, partisipasi substantif masyarakat masih perlu diperkuat, terutama melalui pendidikan politik dan penguatan kepercayaan publik terhadap pemilihan umum.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan KPUD Kota Serang dalam meningkatkan partisipasi pemilih sebagai usaha untuk melaksanakan proses demokrasi. Kajian ini menggunakan teori demokrasi prosedural (Schumpeter), teori partisipasi politik (Almond & Verba, 2018), dan teori penyelenggaraan pemilu (Liando, 2016) sebagai kerangka konseptual untuk memahami peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi strategi, hambatan, dan upaya KPUD Kota Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini dirancang dengan mengajukan tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana strategi KPUD Kota Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024? Apa saja hambatan yang dihadapi KPUD Kota Serang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat? Dan, bagaimana upaya KPUD Kota Serang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Dengan demikian, maka tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh KPUD Kota Serang guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan menganalisis hambatan yang dihadapi, serta menguraikan solusi yang dilakukan untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat.

METODE

Metodologi merupakan ilmu yang mempelajari cara atau teknik yang dipakai dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Metodologi merujuk pada langkah-langkah ilmiah yang harus diikuti untuk memperoleh data yang valid (Sugiyono, 2017). Metodologi bisa juga diartikan sebagai proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan peneliti untuk mendesain studi, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil. Ini mencakup strategi yang diambil peneliti untuk menghubungkan teori dengan praktik dalam penelitian yang dilakukan (Creswell, 2014).

Metodologi merupakan pendekatan yang dipakai dengan tujuan memahami realitas sosial melalui proses pengumpulan dan analisis data. Ini adalah cara sistematis untuk mengidentifikasi dan menafsirkan fenomena dengan memakai berbagai teknik ilmiah (Neuman, 2014). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu penelitian yang berfokus pada satu unit masalah atau obyek untuk menghasilkan deskripsi secara mendalam, kaya, luas dan menyeluruh. Penelitian

yang menggunakan studi kasus merupakan penelitian yang bersifat instrumental (Denzin dan Lincoln 2009: 301).

Penelitian ini merupakan kajian terhadap demokrasi yang dilakukan melalui studi kasus terhadap upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota Serang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui upaya dan peran KPUD Kota Serang dalam peningkatkan partisipasi politik bagi pemilihnya dalam Pilkada Serentak 2024, suatu praktik demokrasi yang luber dan jurdil diharapkan bisa dipahami dan dijelaskan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka, wawancara dan observasi ke lapangan. Sumber lain yang digunakan adalah dokumen resmi terkait Pilkada Serentak 2024. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menafsirkan hasil temuan lapangan dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Strategi KPUD Kota Serang Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada Serentak Tahun 2024

Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat Kota Serang untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dengan pertimbangan pemilu yang berkualitas, maka seberapa besar partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya untuk calon pemimpinnya menjadi salah satu tolok ukur utama kualitas tersebut. Berkaitan dengan itu, maka KPUD Kota Serang, Bawaslu Kota Serang, dan partai politik terus bersinergi dalam melaksanakan sosialisasi tentang pilkada serentak Kota Serang pada tahun 2024.

Ada beberapa metode yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih tersebut. Diantaranya adalah dengan memanfaatkan platform sosial media untuk menyebarluaskan informasi terkait pilkada, seperti tata cara memilih, profil calon, hingga jadwal penting. Berikutnya, dilakukan sosialisasi melalui kampanye digital yang interaktif dan menarik, seperti video pendek, infografik, serta cerita inspiratif dari pemilih, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Upaya lain yang juga dilaksanakan adalah mengadakan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, serta pemuda untuk menggali informasi dan mengarahkan pemilih agar memilih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap calon. Berdasarkan observasi penulis, KPUD Kota Serang juga menerapkan strategi sosialisasi yang bersifat inklusif dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Langkah-langkah yang diambil antara lain: penyebaran informasi melalui media sosial, kampanye digital, forum diskusi dengan tokoh masyarakat, dan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah.

KPUD Kota Serang juga bekerja sama dengan universitas, organisasi pemuda, dan lembaga keagamaan untuk memperluas jangkauan informasi terkait Pilkada Serentak 2024. Selain itu, masyarakat juga menginginkan agar suaranya didengar dan dihargai oleh kandidat. Oleh karena itu, KPUD Kota Serang menyelenggarakan forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, yang tujuannya untuk menciptakan

rasa memiliki terhadap proses demokrasi. Dalam forum ini, aspirasi masyarakat dapat ditampung untuk menjadi masukan bagi calon pemimpin daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan KPUD Kota Serang, pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan atau kemajuan ekonomi masyarakat Kota Serang. Bagi KPUD Kota Serang, edukasi politik merupakan kunci utama untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada. Namun, pendidikan pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya melalui pendekatan berbasis komunitas. Program edukasi ini bisa dilakukan oleh KPUD Kota Serang dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, karang taruna, serta pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

Namun demikian, untuk mewujudkan pemilu yang baik, maka tugas utama bukan hanya pada lembaga penyelenggara. Peran partai politik sangat penting, yaitu melakukan kaderisasi, pendidikan politik, dan sosialisasi politik. Dalam menjalankan kaderisasi, partai politik diharapkan mampu menjangkau kader yang berkompeten serta memberikan pendidikan politik kepada seluruh kader mengenai ideologi partai dan ideologi negara agar menjadi pemimpin yang bisa menetapkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Terkait dengan tugasnya dalam melakukan sosialisasi politik, partai politik memiliki tanggungjawab untuk memobilisasi masa dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pemilu dan pilkada untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab.

Partisipasi aktif dalam pilkada menjadi hal penting. Sebab, ini berarti masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga berperan sebagai subjek yang proaktif dalam proses politik, termasuk dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara (Budiarjo, 2018). Partisipasi politik aktif juga merupakan wujud tindakan warga negara yang dilakukan secara sukarela agar memengaruhi proses politik, termasuk pemilu. Hal ini mencakup tindakan memberikan suara, mendukung kandidat tertentu, hingga mengawasi proses pemilu (Huntington & Nelson, 2018).

Dengan adanya sosialisasi secara masif, maka nampak hasilnya, yaitu dengan adanya peningkatan daftar pemilih Pilkada Serentak 2024 di Kota Serang. Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih mencapai sebanyak 508.278 orang. Sementara pada Pilkada Serentak 2024, jumlah pemilih mencapai 513.744 pemilih. Ada peningkatan sebanyak 5.466 pemilih atau mengalami kenaikan pemilih sebesar 1,01% dibanding Pemilu 2024. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa KPUD Kota Serang memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan jumlah hak pilih. Oleh sebab itu, KPUD Kota Serang melakukan sosialisasi tentang pentingnya hak suara masyarakat.

Selain itu, sosialisasi merupakan kunci dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang paling mendasar. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, beberapa cara yang dilakukan oleh KPUD Kota Serang dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada, antara lain berupa kegiatan edukatif seperti simulasi pemilu, penyebaran informasi melalui media lokal, dan diskusi publik.

- **Potensi Hambatan dari KPU Kota Serang Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pilkada Serentak di Kota Serang 2024**

Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum strategis dalam perjalanan demokrasi lokal, termasuk di Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Pelaksanaan Pilkada di Kota Serang bukan hanya sebagai kegiatan politik rutin, tetapi juga memiliki makna penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Persoalannya, penyelenggaraan Pilkada yang demokratis tidak saja membutuhkan keberadaan perangkat penyelenggara dan regulasi yang memadai, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada tidak hanya diukur dari seberapa banyak warga yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan. Lebih dari itu, partisipasi aktif juga mencakup kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan warga dalam seluruh proses tahapan pemilu. Mulai dari verifikasi data pemilih, mengenali calon, memahami visi-misi kandidat, hingga mengawasi pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara, semua aspek tersebut membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat.

Secara umum, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu merupakan tanggung jawab kolektif. Dengan kata lain, ini bukan hanya menjadi tugas KPUD, tetapi juga melibatkan partai politik, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta media massa. Bagi partai politik yang menjadi salah satu pilar demokrasi, usaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih sangat penting. Sebab, salah satu fungsi partai adalah menjadi agen pendidikan politik. Oleh karenanya, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu juga menunjukkan belum optimalnya peran partai dalam melakukan fungsinya sebagai agen pendidikan politik.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kota Serang, partai-partai lebih fokus pada aktivitas elektoral sesaat seperti kampanye pencalonan atau pencitraan kandidat ketimbang membangun hubungan jangka panjang dengan konstituen. Pendidikan politik yang seharusnya dilakukan untuk membekali masyarakat dengan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya memilih dan memahami calon pemimpin, seringkali diabaikan. Hal ini menyebabkan banyak pemilih bersikap pasif atau bahkan skeptis terhadap proses politik.

Meskipun semangat demokrasi terus didorong, ada berbagai potensi hambatan yang dihadapi oleh KPUD Kota Serang dan partai politik dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Tantangan dan hambatan tersebut muncul antara lain: *Pertama*, rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal berpolitik. Sebab, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang pentingnya Pilkada dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. *Kedua*, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu yang jujur dan adil yang dipraktekkan oleh penyelenggara dan partai politik. *Ketiga*, adanya persaingan yang tidak sehat antar kandidat, seperti kampanye hitam atau penyebaran informasi yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan kebingungan dan apatisme di kalangan masyarakat. *Keempat*, faktor ekonomi masyarakat, yaitu lebih memilih untuk bekerja pada hari pemilihan, dan sering kali menjadi alasan masyarakat tidak hadir di TPS.

Selain itu, dinamika sosial, seperti konflik antarpendukung, juga dapat memengaruhi suasana pemilu dan partisipasi masyarakat. Hambatan dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sering terjadi karena adanya faktor sosial dan budaya. Di masyarakat tertentu, budaya apatis terhadap politik masih dominan karena adanya pandangan bahwa keterlibatan mereka tidak akan memengaruhi hasil pemilu. Hal ini menjadi tantangan bagi KPUD Kota Serang dan partai politik dalam menciptakan pendekatan yang mampu mengubah pola pikir masyarakat (Soekanto, 2018).

Hambatan lain dalam partisipasi politik adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Isu seperti praktik politik uang, janji-janji kosong dari calon, dan kurangnya transparansi proses politik sering kali membuat masyarakat *enggan* berpartisipasi. Selain itu, rendahnya kesadaran politik masyarakat, ketidakpercayaan terhadap proses politik, serta kendala ekonomi yang membuat sebagian warga enggan hadir ke TPS juga menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh KPUD Kota Serang. Isu politik uang dan konflik antarpendukung juga menjadi hambatan bagi terciptanya partisipasi politik yang sehat.

Hambatan ini menjadi tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan partai politik untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (Budiarjo, 2018). Rendahnya pendidikan politik dan minimnya pengalaman langsung masyarakat dalam proses politik dapat menciptakan hambatan psikologis, seperti rasa tidak percaya diri untuk ikut serta dalam Pilkada (Almond dan Verba, 2018). Pemikiran ini

mengkonfirmasi bahwa tugas dan fungsi dari penyelenggara pemilu untuk memberikan edukasi pemahaman akan partisipasi politik sangat penting.

Persoalan ini juga menjadi tantangan bagi partai politik dalam menjalankan pendidikan politik. Partai politik seharusnya bisa menjalankan peran sentralnya sebagai salah satu pilar demokrasi untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat demi membangun peradaban bangsa dan negara yang lebih baik ke depan. Menjaga demokrasi agar tetap sehat tak lepas dari peran seluruh warga negara, serta kecintaan warga terhadap bangsa dan negara sebagai bentuk pembelaan terhadap negara.

- **Upaya KPUD Kota Serang Mengatasi Hambatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kota Serang 2024**

Pilkada Serentak tahun 2024 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Serang. Pilkada Serentak 2024 mendorong terwujudnya demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Tercapainya tujuan tersebut tentu tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan sikap netralitas penyelenggara. Dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat, keterlibatan aktif masyarakat dalam Pilkada bukan hanya menjadi bentuk perwujudan hak politik, tetapi juga menjadi indikator kualitas kehidupan demokrasi lokal.

Persoalan yang terjadi adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk budaya apatis masyarakat terhadap pelaksanaan pesta masyarakat tersebut. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat terhadap pilkada seringkali mengalami fluktuasi, bahkan cenderung menurun di beberapa daerah. Kota Serang pun tidak

lepas dari tantangan tersebut. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari berbagai hambatan, seperti minimnya kesadaran politik, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, dan tantangan geografis.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, KPUD Kota Serang dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara substansial. Dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024, KPUD Kota Serang telah menyusun berbagai strategi dan melaksanakan sejumlah langkah konkret guna mengatasi hambatan partisipasi politik masyarakat.

Upaya-upaya tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan edukatif yang bersifat jangka panjang. KPU Kota Serang telah meluncurkan serangkaian program strategis untuk mengatasi hambatan partisipasi politik. Salah satu langkah utama adalah melakukan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi berbasis komunitas. KPUD Kota Serang menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan untuk menjadi mitra dalam menyampaikan informasi pemilu secara langsung kepada masyarakat. Dengan cara ini, pesan-pesan demokrasi dapat disampaikan dengan pendekatan budaya lokal yang lebih mudah diterima.

Orientasi dari penyelesaian hambatan tersebut, KPUD Kota Serang melakukan beberapa langkah penting: *Pertama*, melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui langkah ini, KPUD Kota Serang berfokus pada edukasi politik yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu, dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada menjadi prioritas utama. KPUD Kota Serang memastikan setiap tahapan pemilu, mulai dari pendataan pemilih hingga penghitungan suara, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan dalam bentuk keterbukaan informasi pemilu yang jujur dan adil, adanya kolaborasi aktif antara pengawas pemilu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang atau penyelewengan dalam melaksanakan pemilu, dan melaksanakan publikasi data atau informasi secara terus-menerus kepada publik.

Ketiga, membuat sistem yang sangat mudah bagi pemilih, yaitu mengatasi hambatan geografis dan kebutuhan khusus menjadi salah satu fokus KPUD Kota Serang agar memastikan setiap warga memiliki akses ke TPS. *Keempat*, melakukan kampanye anti golput kepada masyarakat. Dalam langkah ini, KPUD Kota Serang mengedepankan kampanye anti-golput yang humanis dan inspiratif, dengan menekankan dampak positif partisipasi masyarakat terhadap masa depan daerah.

KPUD Kota Serang melakukan pendekatan partisipatif dengan memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi tahapan pemilu, pendidikan politik berkelanjutan, kampanye anti-golput, serta kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat. Program sosialisasi berbasis komunitas menjadi langkah efektif untuk membangun kesadaran politik di tingkat akar rumput. Melalui pendekatan ini, KPUD menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80% dengan strategi intensif menyasar pemilih pemula, Aparatur Sipil Negara (ASN), kelompok disabilitas, dan

pemilih pemula di sekolah-sekolah, dan lainnya agar mereka tahu gelaran Pilkada sehingga ikut partisipasi dalam pemilihan.

Menurut Ade Jahran, Divisi Bidang Sosialisasi KPUD Kota Serang, dalam sosialisasi juga melibatkan kampus-kampus di Kota Serang yang dihadiri dosen, mahasiswa, serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA). Selain itu, KPUD Kota Serang juga mengundang pegiat literasi seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBN), dan Kampung Dongeng. Dengan langkah ini, KPUD Kota Serang mengharapkan kegiatan ini dapat membangkitkan semangat untuk menjadi relawan KPU dan menyebarkan informasi kepada masyarakat agar partisipasi pemilih di Pilkada 2024 semakin tinggi (Tribunbanten).

SIMPULAN

KPUD Kota Serang melakukan beberapa upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Serang 2024 sebagai pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemilu. KPUD Kota Serang menyadari bahwa kewajiban dalam mematuhi regulasi terkait pemilu dan pilkada berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang harus benar-benar tersalurkan sesuai dengan amanat konstitusi. Hal yang sama juga dilakukan oleh partai politik menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengkaderisasian, pendidikan politik, dan sosialisasi politik.

Pada Pilkada 2024, KPUD Kota Serang menargetkan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 80%. Namun terdapat potensi hambatan yang dihadapi oleh KPUD Kota Serang terutama dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada Serentak di Kota Serang 2024. Hambatan tersebut diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang politik, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik yang diakibatkan oleh banyaknya politik uang, dan adanya persaingan tidak sehat antar kandidat yang berujung pada maraknya politik uang.

Upaya yang dilakukan KPUD Kota Serang untuk mengatasi hambatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Serang 2024 yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada pemilih pemula, sosialisasi kepada tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, dan meningkatkan kampanye di media sosial dengan memanfaatkan dunia teknologi untuk menggali minat dari pemilih agar tidak adanya tindakan tidak memilih (golput). Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya KPUD Kota Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 menunjukkan hasil positif melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Namun, keberhasilan tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan publik dan kesadaran politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G., & Verba, S. (2018). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Arifulloh, Achmad. 2015. *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 2 Nomor 2.
- Asshiddiqie, J. 2016. *Pilkada Serentak dan Dinamika Politik Lokal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, Norman K., dan Lincoln, Yvonna S., 2009, *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan Dariyatno, at.all, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efriza, dan Indrawan, Jerry, 2019, *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. 2018. *Political Participation: Political Development and Stability*. Cambridge: Harvard University Press.
- Isra, Saldi. 2017. *PEMILU dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Publishing.
- Ibrahim, Andi, Hag Alang Asrul & Dkk. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gunadarma Ilmu.
- Kuswandi, Aos. 2004. *Pelaksanaan Fungsi Legislatif dan Dinamika Politik DPRD*. Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" Bekasi.
- Liando, Daud M. 2016. *PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Vol. 3 Nomor 2.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Syafiie, Inu Kencana. 2012. *Teori dan Analisis Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surbakti, R. (2018). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Tjenreng, M. Zubakhrum B. 2020. *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- <https://banten.tribunnews.com/2024/10/21/begini-strategi-kpu-kota-serang-untuk-capai-target-80-persen-partisipasi-pemilih>
- <https://www.bantennews.co.id/kpu-kota-serang-targetkan-partisipasi-pemilih-80-persen-pilkada-2024/>
- Zuhro, S. 2015. *Demokrasi Lokal dan Pilkada Serentak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.